

# PENDIDIKAN SEJARAH LOKAL DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME

Oleh : Supardi

## Abstrak

*Multiculturalism is concept which admit cultural differentiation in the equality and equality. This concept still relevance in the nation concept that have cultural differentiations as Indonesian. Education, is one of an effective media for multiculturalism development. Historical Education have concepts which aim to build democratische, nationalism, and multiculturalism character.*

*One of the historical unit which studied Indonesians heterogenity is local history. This article suppose to identyfy ; 1) how the role local history education to build multiculturalism, 2) how concept of effectivity Local History Education to develop multiculturalism character.*

*Local history studies can give the historical awareness of society differentiations for students. The studies of socials differentiation in last time, will shape multiculturalism character. Local history teaching can be do with three models; 1) out class of history teaching, 2) team teaching among Social Studies Teachers, and 3) insert local history in the subjects that relevance with National History.*

*Key words: multiculturalism, local history, education*

*“Wahai manusia sesungguhnya Aku ciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertaqwa” (QS: 49:13)*

## A. Pendahuluan

Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu *nation state* melalui bidang-bidang atau sistem hukum, **pendidikan**, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keagamaan dan bidang lainnya.

(Tilaar, 2004:84) Multikulturalisme merupakan paham yang mengakui perbedaan/keberagaman dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Demokrasi merupakan salah satu ruh yang menjamin bangunan multikulturalisme.

Multikulturalisme mengandung konsep yang mirip dengan pluralisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:762), multikulturalisme berarti “*gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan*”. Sedangkan pluralisme didefinisikan “*sebagai keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya)*”. Menurut dua definisi ini, pluralisme sifatnya lebih menekankan adanya perbedaan dalam struktur manusia baik sosial maupun politik. Sedangkan multikulturalisme lebih menekankan pada sikap untuk mengakui perbedaan sosial dan kebudayaan dalam rangka membentuk kehidupan bersama.

Indonesia adalah negara multikultural, ditunjukkan oleh deferensiasi sosial dalam bentuk perbedaan etnis, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Menurut data Leo Suryadinata seperti yang dikutip Tilaar (2004:113) setidaknya terdapat 20 suku bangsa terbesar di Indonesia dalam 201 juta penduduk. Etnis Jawa adalah etnis terbesar jumlahnya 83,9 juta (41,7 %), kemudian disusul etnis Sunda 31 juta (15,4%), etnis Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis dan Banten yang masing-masing jumlahnya sekitar 4-7 juta atau 2%-4.5%. Masyarakat Tionghoa merupakan etnis yang jumlah warganya sebanyak 1.738.936 jiwa (0,86%).

Dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik.

(Parsudi Suparlan, 2002) Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil, membentuk terwujudnya masyarakat lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Model multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai 'kebudayaan bangsa', sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Negara multikultural seperti Indonesia harus antisipatif dan responsif terhadap fenomena heterogenitas kebudayaan dengan sikap arif dan bijak. Perbedaan yang selama ini ada telah menimbulkan sisi negatif berupa konflik yang melanda negeri ini, yang salah satunya disebabkan heterogenitas atau deferensiasi sosial dalam masyarakat, seperti yang terjadi dalam kasus konflik antar suku di Sambas Kalimantan Tengah, konflik dengan isu agama di Poso dan Maluku, gerakan separatisme Aceh yang salah satunya dipicu oleh pengelolaan perbedaan yang kurang adil. Kita harus mengakui adanya perbedaan yang ada dalam masyarakat negeri ini, bukan sekedar perbedaan deskriptif tetapi perbedaan normatif. Maksudnya adalah bahwa perbedaan yang ada bukan sekedar kita ketahui, tetapi harus kita sadari dalam kehidupan yang egaliter dan demokratis. Tanpa upaya kesadaran multikulturalisme, niscaya nasionalisme yang selama ini dibangun, akan tercabik-cabik oleh konflik dan gerakan separatisme.

Salah satu media pengembangan kesadaran multikulturalisme adalah pendidikan sejarah. Pengajaran sejarah, merupakan sarana efektif untuk

mempromosikan dan menanamkan kesadaran multikulturalisme. Pendidikan yang selama ini ditanamkan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi telah menjelaskan konsep keberagaman tersebut. Tetapi, sudahkah implementasi pendidikan yang dilaksanakan telah, mencapai taraf normatif? Atau sekedar pendidikan multikulturalisme deskriptif, yang hanya memberikan penjelasan bagaimana bangsa Indonesia dengan *bhinneka Tunggal Ika* layaknya mutiara di Katulistiwa? Ataupun nasionalisme dalam bangsa multikultural sekedar slogan dan indoktrinasi? Kita masih ingat dengan Penataran P4 jaman orde baru, pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) pada pendidikan dasar dan menengah, mata kuliah Kewiraan yang sarat dengan indoktrinasi. Semua mempunyai misi untuk mewujudkan nasionalisme, kesadaran persatuan dalam keberagaman. Tetapi, hal tersebut tidak berhasil mencapai sentuhan kesadaran yang utuh terbukti adanya berbagai gerakan anti multikultural.

Bahkan pendidikan agama yang selama ini ditanamkan pada anak didik, masih banyak mengandung unsur yang menghambat kesadaran multikultural, seperti yang disampaikan Musya Asyar'i dalam Kompas 3 September 2004 sebagai berikut:

*“Pada sisi yang lain, kita pun merasakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik”*

Pendidikan agama di sekolah kurang memasukan hubungan horizontal yang terimplementasi dalam kehidupan nyata. Seakan-akan beban tersebut hanya menjadi tanggungjawab Pendidikan Kewarganegaraan.

Namun dalam menyikapi multikulturalisme haruslah hati-hati, sebab multikulturalisme dapat berkembang negatif ke arah hiper-multikulturalisme, dan *caufisme* seperti menganggap budaya sendiri yang paling baik, pertentangan antara budaya Barat dengan sisa barat, upaya mencari-cari nilai-nilai asli atau “*indegenuous culture*” seperti misalnya penguasa orde baru yang banyak menggunakan bahasa Kawi dalam memberikan nama-nama gedung DPR yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Hiper-multikulturalisme yang lain adalah munculnya anggapan bahwa hanya penduduk asli yang dapat berbicara mengenai budayanya sendiri. (Tilaar, 2004: 89-91).

## **B. Pendidikan Sejarah Lokal**

Sebagai bagian pengikat kesadaran multikulturalisme dalam suatu bangsa adalah kesadaran sejarah. Pendidikan sejarah berperan penting dalam internalisasi dan pembangunan kesadaran sejarah. Namun demikian, sudahkah pembelajaran sejarah dalam sistem pendidikan selama ini telah mengembangkan multikulturalisme secara efektif? Ataukah pengajaran Sejarah Nasional Indonesia hanya sekedar pengungkapan fakta kognitif yang sarat dengan hafalan tokoh dan angka tahun? Atau justru pengajaran sejarah lebih dominan sebagai upaya melanggengkan *status quo* dan alat legitimasi penguasa?. Sudahkah pengajaran sejarah memunculkan berbagai

fakta keberagaman masa lalu hingga masa kini, yang mampu menumbuhkan sikap kesadaran siswa akan keberagaman tersebut?

Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia, dimaksud sebagai salah satu usaha penanaman kesadaran sejarah bangsa Indonesia pada siswa. Apa yang dikenal dengan Sejarah Nasional Indonesia, adalah sejarah bekas wilayah Hindia Belanda. Batasan sejarah nasional bersifat politis administratif sebagai 'sejarah bangsa Indonesia' yang eksistensi politisnya resmi sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejarah Nasional Indonesia selanjutnya diturunkan dalam sejarah daerah yang meliputi sejarah berbagai daerah di Indonesia dengan batasan administratif propinsi atau kabupaten. Sejarah Daerah mempunyai fungsi untuk memperkuat sejarah nasional melalui penjabaran dan mengangkat peran daerah dalam konstelasi nasional. Baik sejarah nasional maupun sejarah daerah bersifat ideologis politik, dan tidak mempunyai batasan ilmiah yang selalu bisa dipertahankan secara akademis. Sebab batasan tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perkembangan politik nasional.

Sering terjadi, dalam penulisan sejarah daerah selalu menonjolkan kasus-kasus yang mempunyai relevansi dengan sejarah nasional. Sebagai contoh, penulisan sejarah daerah dengan mencari kasus-kasus yang berhubungan dengan peranan daerah tersebut dalam kebangkitan nasional, sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan sebagainya. Akibatnya, pembelajaran sejarah terasa kering dan membosankan, karena indoktrinatif dan bersifat *trickle down*.

Di luar kedua batasan sejarah nasional dan daerah, muncul *sejarah Lokal*, yang menurut Taufik Abdullah (1996) didefinisikan sebagai "*sejarah dari*

*suatu tempat*” , suatu *locality*, yang batasannya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah. Penulis mempunyai kebebasan menentukan batasan penulisannya, apakah dengan skope geografis, etnis, yang luas atau sempit. Sejarah lokal bersifat elastis, bisa berbicara mulai hanya mengenai suatu desa, kecamatan, kabupaten, tempat tinggal suatu etnis, suku bangsa, yang ada dalam satu daerah atau beberapa daerah.

Penulisan sejarah lokal mempunyai makna penting baik untuk kepentingan akademis maupun pembangunan masyarakat, terutama kepentingan masyarakat dalam mempelajari pengalaman masa lalu nenek moyangnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Allan J Ligthman (1978:169)

“... local history conducted for their own sake, local history conduct to test hypotheses about broader jurisdictions, usually nation states, and local history that focus on understanding the process by which communities grow and develop. Although analytically distinct, in actual practise these lines frequently crisscross and run together”

Dalam batasan spasial/waktu dalam sejarah lokal, penulis pun bisa membuat batasan terpendek hingga panjang. Penulisan tentang sebuah pemberontakan PETA, bisa dibuat dalam ritme pendek maupun panjang. Hal inilah yang memungkinkan sejarah lokal dapat ditulis oleh siapa saja. Para guru atau penulis lain pun bisa berpartisipasi dalam penulisan sejarah lokal terhadap peristiwa sejarah di daerahnya, melalui bekerjasama dengan sejarawan akademis di perguruan tinggi.

Seminar sejarah lokal telah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional maupun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen Pendidikan Nasional-sekarang). Dalam seminar Sejarah Lokal 17-20 September 1984 di Medan, telah

dikemukakan lima tema pokok sebagai acuan penulisan sejarah lokal seperti yang dikutip Kuntowijoyo (2003:145) :

1. Dinamika masyarakat pedesaan
2. Pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan interaksi sosial
3. Interaksi antar suku bangsa dalam Masyarakat Majemuk
4. Revolusi nasional di tingkat lokal
5. Biografi tokoh lokal.

Dalam bagian lain, Taufik Abdullah (1992:239) menambahkan bahwa penulisan sejarah lokal begitu besar artinya dalam upaya pembahasan yang lebih detail tentang fenomena dan peristiwa nasional yang bersifat fragmentaris. Sejarah lokal diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa kesadaran sebagai bangsa yang multi budaya, ditunjukkan dengan pengakuan akan kelemahan masing-masing dengan membangun kesederajatan di antara kebhinekaan. Dalam multikulturalisme diharapkan berlangsung iklim demokratis yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan.

Bagi kepentingan sejarah nasional, sejarah lokal tidaklah bersifat antagonis, justru akan memberi kontribusi positif, seperti yang disampaikan Taufik Abdullah (1990:243) sebagai berikut:

“... bahwa sejarah lokal dengan pendekatan yang tidak bersifat involusi, yang hanya berkisar pada dirinya, makin memberi kemungkinan untuk merintis permasalahan baru dalam sejarah nasional. Dengan begini bukan saja visi tentang proses ke arah terwujudnya kesadaran nasional, sebagai syarat utama bagi kemandirian integrasi nasional dapat dipersegar, tetapi dan lebih penting lagi , dinamika sesungguhnya dari proses terjadi itu dapat dipahami”

Corak studi sejarah lokal yang telah dilakukan tentang Indonesia menurut Taufik Abdullah (1992:27) dapat dibedakan menjadi empat golongan, yakni :



1. Studi yang difokuskan pada suatu peristiwa tertentu (studi peristiwa khusus atau apa yang disebut *evenemental l'evenement*,
2. Studi yang lebih menekankan pada struktur
3. Studi yang mengambil perkembangan aspek tertentu dalam kurun waktu tertentu (tematis), dan
4. Studi sejarah umum yang menguraikan perkembangan daerah tertentu (propinsi, kota, kabupaten) dari masa ke masa.

Sejarah lokal lebih bersifat demokratis, sebab ia berangkat dari fenomena setempat, berbeda dengan sejarah daerah yang dibatasi secara administratif politik. Namun, bisa saja sebuah sejarah daerah merupakan sejarah lokal, misalnya tentang Sejarah Bali. Bali adalah wilayah administratif yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang relatif sama. Hal ini berbeda ketika kita berbicara tentang Sejarah Daerah Jawa Tengah. Harus diingat, bahwa Jawa Tengah bagian Barat merupakan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya suku Sunda, yang secara kultur berbeda dengan masyarakat Jawa Tengah (Solo atau Semarang). Sejarah lokal mempunyai keleluasaan yang lebih independen dalam menentukan wilayah kajiannya. Kajian sejarah lokal yang intensif dan diversif, akan mampu memunculkan realitas lokal yang lebih heterogen dan bermakna.

## **B. Pengajaran Sejarah Lokal dalam Pendidikan Multikultural**

### ***Pendidikan Multikultural***

Salah satu perangkat efektif untuk mewujudkan kesadaran dan kesederajatan dalam keberagaman adalah konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan konsep pendidikan yang muncul pada masa setelah Perang Dunia II. Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat

manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi semua orang. Pendidikan multikultural menjadi acuan beberapa negara, baik di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia yang penduduknya relatif heterogen.

L Frazier dan R L Garcia seperti yang dikutip Tilaar (2004:122), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah :

“Multicultural education is a concept, a frame work, a way of thingking, a philosophical view point, a value orientation, and a set of criteria for making decision that better serve the educational needs of culturally diverse student populations”

Sedangkan menurut Musa Asyarie, (2004) yang dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Menurut Banks & Banks seperti yang dikutip Tilaar, (2004:182) bahwa terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang, yakni :

1. Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (*cultural difference*)
2. Hubungan manusia (*human relation*), membantu siswa dalam melakukan percampuran antar kelompok
3. *Single group studies*, yakni program yang mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat
4. Pendidikan multikultural, reformasi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pelajaran yang menekankan kepada adanya

perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial.

5. Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial, dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menantang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat.

Bagaimana membangun konsep pendidikan multikultural untuk Indonesia? Terdapat enam konsep yang ditawarkan Tilaar untuk membangun konsep pendidikan multikultural di Indonesia (2004:185-191).

1. “*Right to culture*” dan identitas budaya lokal, sebagai manifestasi jawaban globalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menunjukkan identitas kebudayaan.
2. Kebudayaan Indonesia-yang-menjadi, yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan di tengah sistem keberagaman.
3. Konsep pendidikan multikultural normatif, bukan sekedar deskriptif. Pendidikan multikultural normatif tidak hanya mendeskripsikan adanya pluralitas, melainkan misi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa.
4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini.
5. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru, yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Pedagogik baru telah mengembangkan pemberdayaan dan kesetaraan sesama manusia dengan keberagaman budaya.
6. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.

Untuk mendukung terlaksananya enam konsep pendidikan multikultural, idealnya dilakukan beberapa program prioritas pendidikan multikultural. Beberapa pengembangan yang bisa dilakukan adalah, menjadikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, menyusun kurikulum kewarganegaraan, penyusunan kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan, dan pendidikan guru.

Dalam sistem pendidikan, pendidikan multikultural melibatkan seluruh bagian sistem pendidikan dan *stakeholder* yang ada. Masing-masing mata pelajaran tidak bisa dipandang secara parsial, melainkan mempunyai hubungan yang sifatnya interdisiplin, atau justru integral. Masing-masing bidang studi mempunyai misi dan tugas untuk mengembangkan pendidikan multikultural sesuai dengan relevansinya.

### ***Pendidikan Sejarah Lokal***

Tujuan pengajaran sejarah di sekolah mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pasal 3 UU RI No 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

“... untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Tujuan pengajaran bukan sekedar *transfer of knowledge*, tetapi juga *transfer of value*, bukan sekedar membelajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Pengajaran sejarah selain bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, juga mempunyai fungsi *didaktis*. Fungsi didaktis pengajaran sejarah telah dinyatakan secara implisit dan eksplisit, seperti yang dinyatakan Sartono Kartodirdjo (1992:252) “bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyangnya”. Nilai didaktik pengetahuan sejarah dalam pendidikan masa kini, kecuali bertujuan membangkitkan kesadaran sejarah juga meningkatkan proses rasionalisasi serta melepaskan pikiran mitologis.

Secara lebih detail, Brian Garvey dan Mary Krug (1977: 2-5) mengidentifikasi bahwa mempelajari sejarah mempunyai beberapa maksud, yang diantaranya:

- a) to acquire knowledge of historical facts
- b) to gain an understanding or appreciation of past events or periods or people
- c) to acquire the ability to evaluate and criticize historical writing
- d) to learn the techniques of historical research
- e) to learn how to write history

Pengajaran sejarah pada pendidikan SD dan SMP masih mengacu pada tujuan pertama dan kedua. Sedangkan untuk SMA telah menyentuh sebagian tujuan ketiga sampai kelima.

Baik ditinjau dari sistem pendidikan maupun implementasi pengajaran sejarah selama ini, masih banyak dikeluhkan masyarakat. Di antara keluhan tersebut adalah kurikulum pendidikan sejarah yang terlalu sarat dengan materi yang kurang merangsang siswa berfikir kritis, atau sekedar indoktrinatif. Pengajaran sejarah hanya dijadikan alat legitimasi penguasa dengan penonjolan tokoh-tokoh penting dalam Sejarah Nasional Indonesia. Kurikulum bersifat uniform, bahkan hingga materi dan soal yang diajarkan kepada siswa. Kurikulum belum bisa dikembangkan dengan menonjolkan kasus-kasus lokal yang lebih dekat dan menyentuh siswa. Akibatnya, siswa merasa jenuh, bahkan asing dengan pembelajaran yang mereka alami.

Dalam implementasi pembelajaran di kelas, guru belum berhasil mengembangkan suasana pembelajaran yang variatif. Mereka selalu mengedepankan sistem pembelajaran *ekspositoris* yang menonjolkan pengembangan domain kognitif

Tidaklah mengherankan kalau kemudian siswa *apatis* dan *skeptis* pada mata pelajaran sejarah. Pengajaran sejarah masih berorientasi pada penyajian fakta, belum berorientasi pada upaya penghayatan dan kesadaran sejarah, seperti keprihatinan Soejatmoko yang dikutip I Gde Widja (1989:11) sebagai berikut:

“ Pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu avontuur bersama dari pengajar maupun yang diajar. Dalam konsep ini maka bukan hafalan fakta, melainkan riset bersama antara guru dengan siswa/mahasiswa menjadi metode utama. Dengan jalan ini maka si mahasiswa langsung dihadapkan dengan tantangan intelektual yang memang merupakan ciri khas daripada sejarah sebagai ilmu... Dia menjadi peserta, pelaku dalam usaha ‘penemuan diri’ bangsa kita sendiri”

Berkaitan dengan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, masih didominasi oleh penerbit dan penulis dari Jawa. Tidak mengherankan kalau fakta-fakta yang ada dalam buku mata pelajaran tersebut kering dengan kasus-kasus di berbagai daerah. Bukan berarti bahwa penulis dan penerbit Jawa tidak memahami sejarah daerah lain, tetapi penulis yang lebih dekat dengan objek sejarah, setidaknya akan lebih *empatif* dan *diversif* dalam mengembangkan bahan ajar.

Salah satu ciri ilmu sejarah, adalah sifatnya yang *diakronis* (memanjang), berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang cenderung *sinkronis* (meruang). Selain itu fakta sejarah mempunyai sifat *einmalig* (sekali terjadi). Sifat diakronis dan *einmalig* ini mempunyai konsekuensi bahwa sejarah mempunyai berbagai dimensi dalam mengungkapkan berbagai fakta. Sifat keunikan sejarah juga memberikan ruang untuk lebih intensif mengembangkan penulisan dan pengajaran sejarah lokal.

Penulisan tentang berbagai fenomena lokal, jelas akan memperkaya khazanah heterogenitas bangsa, sekaligus sebagai pijakan multikulturalisme yang efektif.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa sebagian masyarakat lokal mempunyai jalan sejarah yang dianggap negatif, atau mungkin persinggungan konflik dengan komunitas lain. Bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Sejarah lokal mempunyai kerangka kebijaksanaan menyikapi masa lampau. Biarlah masing-masing tempat mempunyai dan menguraikan sejarah yang berbeda dengan lokalitas lainnya. Justru dengan begitu akan muncul kesadaran ‘ibaratnya saling mencurahkan hati’, bahwa tiap lokalitas mempunyai masalah yang berbeda, sehingga bersama-sama saling mencari jalan baru yang lebih terang.

Setiap bagian wilayah Indonesia, mempunyai banyak perbedaan sejarah dan kebudayaan. Sangat naif apabila dibuat penyeragaman sejarah dan budaya tersebut melalui kurikulum nasional. Hendaknya perbedaan yang terjadi, maupun pertentangan yang pernah dialami antara sebagian daerah tidak perlu ditonjolkan tetapi juga jangan ditutup-tutupi, dengan lebih mengedepankan deferensiasi yang sifatnya menuju akomodasi.

Pengungkapan berbagai sisi kehidupan atau sejarah dalam lokalitas, akan semakin menggugah kesadaran betapa masing-masing budaya memiliki keanekaragaman nilai-nilai yang luhur. Kita tidak mungkin memandang bahwa sebagian masyarakat Papua yang masih menggunakan koteka dan sulit menggunakan pakaian modern sebagai masyarakat terbelakang dan tidak punya peradaban. Dengan

berkaca pada sejarah, *stereotype* tersebut akan runtuh dengan kesadaran bagaimana proses manusia menemukan peradaban melalui waktu panjang.

### ***Pembelajaran Sejarah Lokal yang Bermakna***

Idealnya pembelajaran sejarah selalu berangkat dari masalah dan fenomena-fenomena lokal, agar siswa mempunyai perasaan memiliki dan membutuhkan pelajaran yang mereka terima. Terutama pada masa orde baru, pengajaran sejarah terlihat begitu dipaksakan uniformitasnya. Bagaimana mungkin mengajarkan tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro dan Patih Gajah Mada sama persisnya yang diajarkan di Jakarta dengan Papua. Tidak asingkah anak-anak Papua dengan tokoh Diponegoro dan Gajah Mada? Tentu konsep pembelajaran sejarah yang ideal adalah pembelajaran yang mampu menyajikan kesejarahan yang dekat pada lingkungan anak didik. Kepahlawanan lokal akan lebih menarik dan menyenangkan disajikan kepada para siswa di daerah.

Pengajaran sejarah lokal mempunyai peran besar dalam upaya menghadirkan peristiwa kesejarahan yang dekat pada siswa. Elastisitas sejarah lokal mampu menghadirkan berbagai fenomena, baik berkaitan mulai dari latar belakang keluarga (*family history*), sejarah sosial dalam lingkup lokal, peranan pahlawan lokal dalam perjuangan lokal maupun nasional, kebudayaan lokal, asal-usul suatu etnis, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal. Siswa akan diajak memahami realitas sejarah mulai dari yang terkecil, hingga dalam bingkai nasional, dan global.



Bagaimana menyajikan pengajaran sejarah lokal dalam mendukung multikulturalisme?

Setiap masyarakat mempunyai sisi ‘baik’ dan ‘tidak baik’ menurut penilaian yang sifatnya relatif. Atau ada yang mengatakan ‘sejarah hitam’ dan sejarah ‘putih’, walaupun dalam akademis tidak ada istilah tersebut. Apakah tidak dikhawatirkan bahwa penyajian sejarah lokal akan mendorong disintegrasi bangsa? Tentu saja pertanyaan tersebut merupakan kekhawatiran yang bisa dimengerti. Sebab penanaman nilai kesejarahan dengan menonjolkan luka-luka masa lampau, akan menghidupkan semangat pertentangan. Tetapi, hendaknya penyajian pengajaran sejarah mampu menghadirkan nilai objektif, dengan penuh muatan edukatif. Multikulturalisme mengembangkan kesederajatan, yang berarti menghapus luka masa lalu dengan menghadirkan kehidupan yang lebih egaliter.

Pengajaran Sejarah tidak perlu terlalu menutup-nutupi realitas sejarah yang telah terjadi, tetapi hendaknya penyajian pengajaran sejarah mampu dihadirkan dengan penuh muatan edukatif akan kesadaran membangun nilai-nilai luhur secara bersamaan. Seperti terjadinya konflik pada tahun 1960-an, aksi-aksi PKI dan organisasi *onderbownya* telah menimbulkan luka yang mendalam dalam tubuh masyarakat, terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Demikian juga dengan gerakan penumpasan PKI, telah menimbulkan korban ratusan ribu sebagai akumulasi konflik masa sebelumnya. Haruskah pengajaran sejarah selamanya menutupi kasus yang sungguh terjadi dalam bangsa kita? Hendaklah dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran sejarah, pembelajaran bisa menanamkan bahwa pengalaman sejarah

sebagai guru yang paling baik. Kesalahan masa lalu menjadi pengalaman untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik.

### ***Implementasi Kurikulum 2004***

Bagaimana mengajarkan sejarah lokal dalam siswa pendidikan dasar dan menengah? Pemberlakuan kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan sebutan “Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan tantangan tersendiri bagi praktisi dan pengambil kebijakan pendidikan sejarah. KBK merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performatansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (E Mulyasa, 2004:39). KBK tidak hanya mengedepankan pengembangan pengetahuan kognitif, tetapi meliputi pengembangan afektif (sikap) dan psikomotorik (gerak).

Salah satu aspek yang sangat menguntungkan dengan KBK adalah mengutamakan pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual (alamiah), berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan kompetensi. KBK juga memberikan kesempatan kepada daerah dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum pendidikan. Hal ini berbeda dengan beberapa kurikulum sebelumnya yang lebih bersifat sentralistis. Kesempatan ini bisa digunakan untuk mengembangkan realitas lokal yang lebih menyentuh anak didik yang erat berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari.

Waktu yang terbatas dalam pengajaran sejarah, tidak memungkinkan pengajaran sejarah lokal disajikan dalam bagian tersendiri. Pengajaran topik sejarah lokal dalam pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan dalam beberapa cara. *Pertama*, melalui penyisipan pada beberapa topik sejarah nasional yang mempunyai korelasi dengan peristiwa lokal. Misalnya dalam peristiwa revolusi kemerdekaan, guru di Sumatera dapat menonjolkan peranan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). *Kedua*, melalui studi khusus terhadap perpustakaan, museum, maupun berbagai peninggalan sejarah. Hal ini dapat dilakukan satu semester sekali untuk mengenalkan sejarah dan budaya masyarakat setempat. *Ketiga*, melalui *team teaching* guru IPS bisa melakukan kolaborasi untuk membahas masalah lokal secara interdisiplin. Pengajaran sejarah lokal di sekolah juga perlu menghadirkan realitas fenomena pada lokalitas yang lain. Hal ini sangat penting dalam upaya mengerti dan berempati dengan keberagaman budaya lain.

#### **D. Kesimpulan**

Multikulturalisme merupakan paham yang mengutamakan pengakuan kesederajatan dan kebersamaan dalam keberagaman. Pendidikan multikultural sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dalam bingkai multikulturalisme. Upaya penanaman kesadaran multikulturalisme salah satunya dilakukan melalui pendidikan Sejarah Nasional Indonesia. Namun, pengajaran Sejarah Nasional Indonesia selama ini terlalu sentralistis, cenderung politis ekspositoris, baik dalam kurikulum maupun pengembangannya. Akibatnya, siswa

cenderung memahami sejarah bangsa Indonesia sebagai suatu keseragaman sejarah. Padahal setiap lokalitas mempunyai keunikan perbedaan masa lalu yang perlu dihadirkan dalam pembelajaran sejarah.

Salah satu alternatif pengembangan sejarah dalam mendukung multikulturalisme adalah melalui pengajaran sejarah lokal. Sejarah lokal adalah suatu unit kajian sejarah yang mengangkat topik/tema sejarah suatu tempat/lokalitas. Melalui studi sejarah lokal dapat menghadirkan realitas sejarah masyarakat peserta didik dan masyarakat luar lokalitas yang bisa menumbuhkan kesadaran dan sikap keberagaman. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) semakin memberikan ruang kepada guru dan daerah untuk memasukan kajian sejarah lokal dalam mewujudkan perasaan dan kesadaran multikulturalisme.

Konsep pengajaran sejarah lokal melalui KBK dapat dilakukan melalui studi di luar kelas (*out class of history teaching*). Selain itu dapat pula dilakukan melalui pengajaran *team teaching* antara guru-guru IPS, dan menyisipkan materi sejarah lokal dalam membahas topik nasional yang berhubungan dengan permasalahan lokal. Melalui konsep ini, pengajaran sejarah akan lebih bermakna bagi siswa dan mendukung target pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- E Mulyasa (2004), *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Rosda Karya
- Garvey, Brian and Krug Mary (1977), *Models of History Teaching in the Secondary School*, London: Oxford University Press
- H.A.R. Tilaar (2004), *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grassiondo
- Kuntowijoyo (1993). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang
- Lichtman, Alan J & Valerie French (1978), *Historians and The Living Past, The Theory and Practice of Historical Study*, Arlington Heights: Harlan Davidson.
- Sartono Kartodirdjo (1992), *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Taufik Abdullah, "Dari Sejarah Lokal ke Kesadaran Nasional: Beberapa Problematik Metodologis" dalam Sartono Kartodirdjo (1985), *Dari Babat dan Hikayat Dalam Sejarah Kritis*, Yogyakarta: UGM Press.
- (1992), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Jurnal, Paper, internet, dan koran*
- Anhar Gonggong , "Peranan Sejarah Lokal Untuk Mewujudkan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia*, Bali 22-26 Februari 2005
- I Gde Widja , "Multikulturalisme dan Peran Studi Sejarah Lokal" ," *Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia*, Bali 22-26 Februari 2005
- Hartono Kasmadi, "Multikultural Pendidikan" , *Makalah Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia*, Bali 22-26 Februari 2005

Tim, “Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II” *Kumpulan Makalah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Musa Asy’arie, “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa “, *Kompas*, 03 September 2004

Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Simposium Internasional Bali ke-3 16-21 Juli 2002, [www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel\\_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm)

Undang-Undang RI No 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

TMS: Jurnal

**PENDIDIKAN SEJARAH LOKAL  
DALAM KONTEKS MULTIKULTURALISME**



OLEH :

SUPARDI (04705251004)

**SEMESTER : 02**  
**PRODI : PIPS**  
**PROGRAM : PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS : NEGERI YOGYAKARTA**  
**TAHUN : 2005**

*Multikulturalisme merupakan paham yang mengakui perbedaan/keberagaman dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Konsep multikulturalisme masih relevan dalam konsep negara yang mempunyai keanekaragaman budaya seperti Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu media efektif untuk mengembangkan multikulturalisme. Pendidikan Sejarah, sebagai salah satu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membangun sikap demokrasi dan nasionalisme dan kesadaran multikulturalisme.*

*Sebagian misi penting Pendidikan Sejarah adalah mengembangkan kesadaran keberagaman dalam kesetaraan. Salah satu unit sejarah yang mengkaji heterogenitas bangsa Indonesia adalah sejarah lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana peranan pendidikan sejarah lokal dalam mengembangkan multikulturalisme, 2) bagaimana konsep pengajaran sejarah lokal yang efektif untuk mengembangkan kesadaran multikulturalisme.*

*Kajian sejarah lokal mampu memberikan kesadaran sejarah keberagaman masyarakat pada siswa. Melalui kajian perbedaan masa lalu setiap masyarakat, sikap multikulturalisme dapat terbentuk. Pengajaran sejarah lokal dapat dilakukan melalui tiga model, 1) pengajaran di luar kelas (**out class of history teaching**), 2) **team teaching** antara beberapa guru IPS, dan 3) menyisipkan pengajaran sejarah lokal dalam materi yang berhubungan dengan sejarah nasional.*

*Multiculturalism is concept which admit cultural differentiation in the equality and equality. This concept still relevance in the nation concept that have cultural differentiation as Indonesian. Education, is one of an effective media for multiculturalism development. Historical Education have concepts which aim to build democratic, nationalism, and multiculturalism character.*

*One of the historical unit which studied Indonesians heterogeneity is local history. This article suppose to identify ; 1) how the role local history education to build multiculturalism, 2) how concept of effectivity Local History Education to develop multiculturalism character.*

*Local history studies can give the historical awareness of society differentiations for students. The studies of social differentiation in last time, will shape multiculturalism character. Local history teaching can be do with three models; 1) out class of history teaching, 2) team teaching among Social Studies Teachers, and 3) insert local history in the subjects that relevance with National History.*



Konsep multikulturalisme masih relevan dalam konsep negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Multikulturalisme mengedepankan kesamaan derajat setiap anggota masyarakat, diwujudkan dalam sikap yang egaliter dan demokratis. Pendidikan merupakan media efektif untuk mengembangkan multikulturalisme. Pendidikan Sejarah, sebagai salah satu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membangun sikap demokrasi dan nasionalisme yang menyadari multikulturalisme. Salah satu misi penting Pendidikan Sejarah adalah mengembangkan kesadaran keberagaman dalam kesetaraan. Salah satu unit sejarah yang mengkaji heterogenitas bangsa Indonesia adalah sejarah lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana peranan pendidikan sejarah lokal dalam mengembangkan multikulturalisme, 2) bagaimana konsep pengajaran sejarah lokal yang efektif untuk mengembangkan kesadaran multikulturalisme.

*Multiculturalism concept still relevance in the nation concept that have cultural differentiation. Multiculturalism define equality in every community, that be show in democratic attitudes. Education is an effective media for multiculturalism developing. History Education, is one of the education concept that goal to build nationalism character. One of the important mission History Education is developing differentiation and equality character. This article suppose to identify ; 1) how the role local history education to build multiculturalism, 2) how concept of effectiveness Local History Education to develop multiculturalism character.*